

SKRIPSI

**UPAYA PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM OLEH KANTOR
DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA TERHADAP WARGA NEGARA
INDONESIA DI TAIWAN**

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

INNEKE SRIELANA JUFNI

BP : 1310111090

PEMBIMBING :

1. Prof . H. Firman Hasan, S,H,LL.M 195211111979031002
2. Hj. Magdariza, S.H., M.H 196210241989012002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017

No. Reg: 4817/PK VII/III/2017

**UPAYA PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM OLEH KANTOR
DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA TERHADAP WARGA NEGARA
INDONESIA DI TAIWAN**

Inneke Srielana Jufni, 1310111090, Fakultas Hukum Unand, Hukum
Internasional, 2017, 60 halaman

ABSTRAK

Indonesia tidak memberikan pengakuan kepada Taiwan didasarkan pada *One China Policy*, dengan alasan tersebut Indonesia tidak mempunyai perwakilan diplomatik dan konsuler di Taiwan, melainkan hanya berupa Kamar Dagang dan Ekonomi. Keberadaan Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei tidak hanya bertugas dan berfungsi dalam urusan perekonomian dan perdagangan, tetapi juga memberikan fungsi kekonsuleran berupa perlindungan dan bantuan hukum. Didasari hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk meneliti tentang peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Upaya Perlindungan dan Bantuan Hukum Oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Terhadap Warga Negara Indonesia di Taiwan”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris, dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder lalu dibantu dengan menekankan aspek hukum bekeanaan dengan penerapannya di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui studi kepustakaan dan data pendukung melalui studi lapangan (wawancara). Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan telah memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia di Taiwan dengan cara menyediakan situs lapor diri secara *online*, memberikan sosialisasi ke kampus-kampus, dan menjalankan program KDEI *Sunday Service* dan KDEI *Mobile Service*. Dalam memberikan bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia yang bermasalah, KDEI melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan bantuan hukum baru bisa diberikan apabila warga negara Indonesia yang bermasalah meminta. Jika dihubungkan dengan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, maka KDEI telah menjalankan Pasal 5 huruf a, b, d, f, g dan i yang relevan dengan fungsi kekonsulerannya .

Kata Kunci : Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), Perlindungan dan Bantuan Hukum, Warga Negara Indonesia.

EFFORT OF LEGAL PROTECTION AND LEGAL AID BY INDONESIAN
ECONOMIC AND TRADE OFFICE TOWARDS INDONESIAN CITIZENS IN
TAIWAN

Inneke Srielana Jufni, 1310111090, Faculty of Law Andalas University,
International Law(PKVII), 2017, 60 Pages

ABSTRACT

Indonesia does not give recognition to Taiwan based on One China Policy, with that being said Indonesia does not have Diplomatic and Consular Representatives in Taiwan. However, an Indonesian Economic and Trade Office does exist in Taiwan. The existence of Indonesian Economic and Trade Office in Taipei does not solely have the duty and function regarding the economy and trading, but it also provides consular functions such as legal protection and legal aid. Based on this, the writer decided to write about the role of Indonesian Economic and Trade Office in giving legal protection and legal aid in the form of a thesis which is titled "Effort Of Legal Protection And Legal Aid By Indonesian Economic And Trade Office Towards Indonesian Citizens In Taiwan". The research method that the writer used is a normative research and is supported by empirical research. The result of the research can be concluded that Indonesian Economic and Trade Office has given law protection to all of the Indonesian citizens in Taiwan by providing *lapor diri* sites online, providing socialization to campuses in Taiwan, and running KDEI Sunday Service and KDEI Mobile Service programme. In giving legal aids to Indonesian citizens that has legal issues, KDEI cooperates with Indonesia Ministry of Foreign Affairs, and the legal aid is only given when the Indonesian citizen asks for it. With regards to the Vienna Convention on Consular Relation 1963, KDEI has implemented article 5 point a, b, d, f, g and i which is relevant to the function of consular.

Keywords : Indonesian Economic and Trade Office, Legal Protection and Legal Aid, Indonesian Citizens.